

ISSN-E: 2623-2065
ISSN-P: 2684-8872

SINDANG

JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH

Vol 4 No. 1 (Januari-Juni 2022)

Ruang Lingkup Filsafat Sejarah dalam Kajian Sejarah
Arditya Prayogi

Menumbuhkan Kesadaran Sejarah Generasi Muda Melalui Kearifan Lokal Budaya Melayu Riau
Asril

Urgensi Kerja Sama Sektor Pariwisata untuk Meningkatkan Hubungan Thailand-Kamboja Pasca Sengketa Kuil Preah Vihear
Marshanda Fitria Intan

Model Pembelajaran *Problem Based Learning* sebagai Implementasi Aliran Konstruktivisme Pada Pembelajaran Sejarah
Abdilah Farid Rifki, Yulianti

Konflik Abad 11-12 M: Pertikaian Dinasti Mongol dengan Dinasti Khawarizm di Asia Selatan
Suci Indah Susanti, Yulianti

Peranan Abdur Rahim Damrah dalam Melawan Penjajahan Jepang di Kabupaten Bengkulu Selatan (1943-1945)
Juliana, Bedriati Ibrahim, Bunari

Pengaruh Covid-19 terhadap Pengunjung Objek Pariwisata Sejarah Lobang Jepang di Bukittinggi
Mellyana Alfia Ningsih, Isjoni, Bedriati Ibrahim

Sejarah Kesultanan Pajang Masa Pemerintahan Sultan Hadiwijaya (1549-1582)
Chinanti Safa Camila, Hudaidah

Peranan K.H. Anwar Bin H. Kumpul dalam Pendirian dan Perkembangan Pondok Pesantren Nurul Islam Seri Bandung
Arenda Rosyada, Hudaidah

Persepsi Siswa terhadap Pembelajaran Sejarah pada Masa Covid-19 pada Siswa Kelas XII IIS SMA Negeri Mukomuko Kabupaten Mukomuko
Suci Anggela, Jaenam, Felia Siska



Dewan Redaksi

SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah

Editor in Chief

Risa Marta Yati, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Section Editor

Ira Miyarni Sustianingsih, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Guest Editor

Dr. Syarifuddin, M.Pd. (Universitas Sriwijaya)

Ayu Septiani, M.Hum. (Universitas Padjadjaran)

Reviewer/Mitra Bestari

Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Kunto Sofianto, M.Hum., Ph.D. (Universitas Padjadjaran)

Dr. Umasih, M.Hum. (Universitas Negeri Jakarta)

Administrasi

Viktor Pandra, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Dr. Doni Pestalozi, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Dewi Angraini, M.Si. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Alamat:

Jl. Mayor Toha Kel Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau 31626

Website: <http://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/index>

Email: jurnalsindang@gmail.com

SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH
Vol. 4 No. 1 (Januari-Juni 2022)

	Halaman
Dewan Redaksi	i
Daftar Isi	ii
1. Ruang Lingkup Filsafat Sejarah dalam Kajian Sejarah <i>Arditya Prayogi</i>	1
2. Menumbuhkan Kesadaran Sejarah Generasi Muda Melalui Kearifan Lokal Budaya Melayu Riau <i>Asril</i>	11
3. Urgensi Kerja Sama Sektor Pariwisata untuk Meningkatkan Hubungan Thailand-Kamboja Pasca Sengketa Kuil Preah Vihear <i>Marshanda Fitria Intan</i>	18
4. Model Pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> sebagai Implementasi Aliran Konstruktivisme pada Pembelajaran Sejarah <i>Abdilah Farid Rifki, Yulianti</i>	27
5. Konflik Abad 11-12 M: Pertikaian Dinasti Mongol dengan Dinasti Khawarizm Di Asia tengah <i>Suci Indah Susanti, Yulianti</i>	33
6. Peranan Abdur Rahim Damrah dalam Melawan Penjajahan Jepang di Kabupaten Bengkulu Selatan (1943-1945) <i>Juliana, Bedriati Ibrahim, Bunari</i>	41
7. Pengaruh Covid-19 terhadap Pengujung Objek Pariwisata Sejarah Lobang Jepang di Bukittinggi <i>Mellyana Alfia Ningsih, Isjoni, Bedriati Ibrahim</i>	51
8. Sejarah Kesultanan Pajang Masa Pemerintahan Sultan Hadiwijaya (1549-1582) <i>Chinanti Safa Camila, Hudaidah</i>	58
9. Peranan K.H. Anwar Bin H. Kumpul dalam Pendirian dan Perkembangan Pondok Pesantren Nurul Islam Seri Bandung <i>Arenda Rosyada, Hudaidah</i>	66
10. Persepsi Siswa terhadap Pembelajaran Sejarah pada Masa Covid-19 pada Siswa Kelas XI IIS SMA Negeri Mukomuko Kabupaten Mukomuko <i>Suci Anggela, Jaenam, Felia Siska</i>	74

URGENSI KERJA SAMA SEKTOR PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN HUBUNGAN THAILAND-KAMBOJA PASCA SENGKETA KUIL PREAH VIHEAR

Marshanda Fitria Intan
Universitas Negeri Malang

Alamat korespondensi: marshandafitriaintan@gmail.com

Diterima: 12 Maret 2021; Direvisi: 30 November 2021; Disetujui: 30 Desember 2021

Abstract

This study aims to determine the urgency of cooperation in the tourism sector to improve relations between Thailand and Cambodia after the conflict dispute. Tracing data was carried out using literature study. The results show that the disputed conflict between Thailand and Cambodia which has made relations between the two countries worse has been resolved through the ASEAN mechanism in a peaceful manner. After the dispute was resolved, the two parties sought cooperation in the tourism sector to improve relations between the two, such as the implementation of a single visa and D3 tourism student exchange. So that cooperation in the tourism sector has an important role in restoring the relationship between the two.

Keywords: *Tourism, dispute, Thailand, Cambodia.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi kerja sama sektor pariwisata untuk meningkatkan hubungan Thailand dan Kamboja pasca konflik sengketa. Penelusuran data dilakukan menggunakan studi pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa konflik sengketa antara Thailand dan Kamboja yang membuat hubungan kedua negara menjadi buruk berhasil diselesaikan melalui mekanisme ASEAN dengan cara damai. Setelah sengketa selesai kedua pihak mengupayakan kerja sama di bidang pariwisata untuk meningkatkan hubungan keduanya seperti pemberlakuan single visa dan pertukaran pelajar D3 pariwisata. Sehingga kerja sama di bidang pariwisata memiliki peran yang penting terhadap pemulihan hubungan keduanya.

Kata Kunci: *Pariwisata, sengketa, Thailand, Kamboja.*

A. Pendahuluan

Konflik dan masalah merupakan suatu hal yang lumrah dalam hubungan internasional, konflik terjadi karena perbedaan pendapat serta kepentingan antara satu negara dengan lainnya. Konflik juga pernah terjadi di antara Kamboja dan Thailand. Konflik tersebut mengenai sengketa kuil Preah Vihear yang berada diperbatas kedua negara. Sebelum terlalu memanas di tahun 2008-2011, sengketa tersebut juga pernah terjadi, pada tahun 1953. Pada waktu itu Thailand mengirim tentaranya ke kuil Preah Vihear, hingga menyebabkan terjadi ketegangan antara kedua negara, kejadian tersebut terjadi setelah Kamboja merdeka dari jajahan Perancis pada tahun 1953. Tentara militer Thailand yang berada di kuil Preah Vihear ditugaskan untuk menjaga kuil

tersebut, karena Thailand merasa kuil dan wilayah sekitarnya merupakan kedaulatannya. Merasa kedaulatannya diganggu oleh Thailand, Kamboja menyerahkan permasalahan sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional. Berdasarkan peta yang dibuat oleh kolonial Perancis saat menduduki Kamboja dengan Siam tahun 1907, Mahkamah Internasional menetapkan keputusan akhir yaitu kepemilikan kuil berada di wilayah kedaulatan dari Kamboja. Sehingga pasukan militer Thailand harus meninggalkan wilayah kedaulatan Kamboja dan mengembalikan benda-benda di kuil yang telah diambil oleh Thailand (Mangku, 2011:107).

Setelah beberapa dekade keadaan kedua negara relatif aman damai, tapi pada tahun 2008 memanas kembali.

Diawali ketika kuil Preah Vihear yang berusia lebih dari 900 tahun ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Langkah Kamboja untuk mendaftarkan kuil Preah Vihear ke UNESCO menjadi pemicu memanas kembali hubungan antara kedua negara (Widia,2018:20). Penetapan tersebut membuat Thailand merasa dirugikan, karena beranggapan bahwa kuil Preah Vihear berada di kedaulatannya. Terlebih wilayah disekitar kuil yang berukuran 4,6 km² belum ditetapkan oleh International Court of Justice (ICJ) sehingga wilayah tersebut masih menjadi sengketa antara Thailand dan Kamboja. Ketegangan antar kedua negara, menimbulkan kontak senjata tentara militer Thailand dan Kamboja yang diawali dengan penangkapan tiga demonstran Thailand yang masuk ke Kuil Preah Vihear yang merupakan wilayah kedaulatan Kamboja. Kontak senjata juga dimulai saat tentara militer Thailand menginjak ranjau di perbatasan yang menyebabkan tentara tersebut harus kehilangan kakinya. Kontak senjata tersebut menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari tentara militer kedua negara yang bersengketa. Konflik Thailand dan Kamboja yang terjadi selama tiga tahun, tepatnya tahun 2008-2011. Sengketa tersebut sudah diupayakan untuk berdamai, baik penyelesaian secara bilateral, melalui ASEAN, dan PBB serta Mahkamah Internasional. Pada awalnya kedua negara menggunakan upaya bilateral untuk mencari jalan keluar mengenai sengketa tetapi tak kunjung mendapatkan titik terang.

Sehingga Kamboja meminta bantuan pada pihak ketiga yaitu PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi penengah konflik antara Thailand dan Kamboja. Tetapi Dewan Keamanan PBB menolak dan menyarankan kedua negara untuk menyelesaikan secara damai dengan bantuan ASEAN. Berkat peran ASEAN sebagai pihak ketiga perlahan hubungan kedua negara menjadi lebih baik. Pasca sengketa tersebut, Thailand dan Kamboja berusaha untuk meningkatkan hubungannya yang sempat memanas

dengan mengadakan hubungan-hubungan kerja sama, salah satunya adalah sektor pariwisata. Salah satu bentuk kerja samanya adalah pengembangan pendidikan dibidang pariwisata bagi 3 negara Kamboja, Thailand dan Indonesia, dalam kerja sama ini ketiga negara mengembangkan program kerja sama pendidikan Diploma 3 (D3) dalam sektor pariwisata yang memungkinkan terjadi pertukaran pelajar (Nurfadhilah,2017:10). Sehingga perlahan hubungan kedua negara membaik dengan kerja sama di sektor pariwisata. Pariwisata menjadi salah satu pemasukan negara yang terbesar, oleh karenanya kerja sama Thailand-Kamboja di sektor pariwisata memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperbanyak pemasuka negara. Kerja sama tersebut juga meningkatkan wisatawan Kamboja yang berkunjung ke Thailand dan demikian juga sebaliknya (Raharjo,2013:114). Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kerja sama sektor pariwisata Thailand dan Kamboja membawa hubungan kedua negara menjadi lebih baik pasca sengketa.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis (jurnal ilmiah, buku, surat kabar) yang hendak diteliti, lalu data tersebut dianalisa sehingga menghasilkan jawaban mengenai penelitian yang dilakukan (Chandara,2016:36). Penelusuran data menggunakan analisa studi pustaka dan pengolahan data dilakukan secara deskriptif-kualitatif tanpa adanya angka angka perhitungan.

C. Pembahasan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri sehingga membutuhkan pihak lain. Oleh karena itu memiliki hubungan dengan pihak lain diperlukan untuk menunjang kehidupan. Begitupula bagi negara, untuk dapat berjalan dengan baik suatu negara membutuhkan kerja sama

dengan negara lain yang akhirnya menghasilkan suatu hubungan internasional antara negara tersebut dengan lainnya. Hubungan internasional menghasilkan kerja sama yang menghasilkan keuntungan bagi pihak yang turut serta, oleh karena itu negara perlu melakukan suatu hubungan dengan negara lain untuk mencapai kepentingan masing-masing. Walaupun menghasilkan keuntungan, hubungan internasional juga terkadang memunculkan suatu permasalahan. Permasalahan terjadi jika ada pihak yang melakukan pelanggaran yang menyalahi aturan sehingga mengakibatkan timbulnya konflik (Artega dkk, 2019:160).

Konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak satu dan pihak lainnya, ada berbagai kasus konflik yang terjadi antar negara. Salah satunya adalah sengketa. Sengketa atau persengketaan merupakan suatu perbedaan pendapat mengenai keadaan obyek yang disertai pengklaiman oleh satu pihak serta penolakan oleh pihak lain (Merrills, 1991 dalam Mangku, 2012:151). Konflik sengketa yang pernah terjadi salah satunya yaitu sengketa kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja pada 2008- 2011. Preah Vihear merupakan kuil yang berada di bukit, di pegunungan Dangrek yang terletak di perbatasan Kamboja dan Thailand. Kuil tersebut terletak di perbatasan Provinsi Preah Vihear dan di kawasan taman nasional dengan Provinsi Sisaket di Thailand (Chandara, 2016:36). Preah Vihear merupakan kuil untuk agama Hindu yang didirikan oleh raja Kamboja pada abad ke-11 untuk tempat beribadah. Thailand dan Kamboja merupakan negara yang bertetangga, sebelumnya Kamboja adalah negara yang dijajah Perancis dan Thailand adalah kerajaan yang bernama Siam. Setelah Kamboja merdeka dari Perancis pada tahun 1953, satu tahun kemudian Thailand menduduki wilayah kuil Preah Vihear karena menurut Thailand wilayah tersebut merupakan kedaulatannya. Pada 13 Februari 1904 antara Perancis

(yang menjajah Kamboja) dan Kerajaan Siam atau Thailand, sebenarnya telah menetapkan garis batas kedua negara dalam perjanjian FrancoSiamese (Mangku, 2011:2).

Tetapi dalam perjanjian tersebut tidak menyebutkan dengan jelas di mana kedaulatan kuil Preah Vihear berada. Kamboja dan Thailand mengklaim bahwa keduanya memiliki data yang dijadikan bukti atas kepemilikan kuil Preah Vihear. Bukti yang memperkuat pernyataan bahwa kuil berada di kedaulatan Kamboja yaitu pendiri kuil Preah Vihear adalah raja Kamboja, sehingga kuil dan wilayah sekitarnya juga menjadi bagian dari negara Kamboja. Selain itu berdasarkan peta yang dibuat kolonial Perancis semasa menduduki Kamboja dengan Kerajaan Siam (Thailand) pada tahun 1907. Sedangkan Thailand juga memiliki bukti yang didasari peta tahun 1904 yang menyatakan letak kuil berada di kedaulatannya, selain itu tradisi berdoa di kuil Preah Vihear bagi masyarakat Thailand yang tinggal diperbatasan juga menjadi bukti bahwa kuil tersebut merupakan wilayah Thailand (Chandara, 2016:42). Upaya diplomatik yang dilakukan kedua pihak untuk menyelesaikan masalah tidak membuahkan hasil, sehingga pada tahun 1959 pemerintahan Kamboja mengajukan masalah tersebut ke Mahkamah Internasional. Pada 15 Juni 1962, (International Court of Justice) atau ICJ memutuskan kuil Preah Vihear adalah bagian dari wilayah Kamboja, berdasarkan peta yang dibuat tahun 1907 sehingga Thailand harus menarik pasukannya yang berada di sekitar kuil (Mangku, 2011:107).

Meskipun kuil sudah ditetapkan sebagai kedaulatan Kamboja, tetapi wilayah sekitar kuil yang berukuran 4,6 km² masih menjadi sengketa karena tidak ditetapkan oleh ICJ. Walaupun dalam beberapa dekade kedua negara terkesan damai, tetapi Thailand sebenarnya masih menolak keras keputusan MI mengenai kedaulatan kuil Preah Vihear dan tetap berpegang teguh jika kuil dan wilayah sekitar merupakan

kedaulatan negaranya. Pada 2008, kuil Preah Vihear ditetapkan UNESCO menjadi warisan dunia atas permintaan Kamboja, tapi disisi lain Thailand merasa dirugikan karena wilayah seluas 4,6 KM² masih menjadi sengketa, Thailand melakukan proses keras terhadap penetapan tersebut. Sehingga sengketa antar kedua negara kembali meletus dan menghasilkan konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja. Konflik senjata dimulai saat tiga orang demonstran Thailand ditangkap oleh tentara Kamboja karena berusaha untuk masuk ke wilayah kuil Preah Vihear yang merupakan kedaulatan Kamboja, setelah kejadian itu kedua negara memperketat penjagaan perbatasan dengan manambah personil tentara militer. Setelah kejadian itu, untuk pertama kalinya pada tanggal 3 Agustus 2008 tentara militer Thailand dan Kamboja terlibat pertikaian senjata selama sepuluh menit sehingga melukai satu tentara Kamboja (Chandara,2016:40). Dalam aksi baku tembak tersebut sering terjadi ledakan ranjau di perbatasan kedua negara sehingga menyebabkan banyak tantara militer Thailand yang luka-luka dan bahkan ada yang sampai kehilangan kakinya karena terkena ranjau. Dikarenakannya sering meledaknya ranjau, Thailand pun curiga dan menuduh tentara Kamboja sengaja menanam ranjau di wilayah sengketa tersebut sehingga menyebabkan konflik sengketa antar kedua negara semakin memanas. Pada 15 Oktober 2008 kontak senjata terjadi lagi antara tentara militer kedua negara yang menyebabkan jatuhnya korban, tiga tentara Kamboja dan seorang tentara Thailand yang berada di perbatasan (Chandara,2016:40).

Beberapa bulan setelahnya yaitu pada 3 April 2009 tentara militer dari kedua negara terlibat kontak senjata lagi, yang bermula ketika tentara Thailand mencoba mempersulit wisatawan masuk ke kuil Preah Vihear dengan cara menutup akses ke Taman Nasional Khao Phra Wihan dan Karang Bukit Pha Mo E-Daeng dan (Wiguna dkk, 2015:10).

Peristiwa tersebut membuat terjadi kembali aksi senjata di perbatasan anatar Thailand dengan Kamboja, sehingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan banyak yang luka-luka. Pasca aksi bersenjata, Kamboja meminta Thailand untuk ganti rugi atas tindakannya yang telah menyebabkan kerusakan dan terbakarnya kompleks pasar yang mengakibatkan 319 keluarga kehilangan pekerjaan, Thailand harus membayar sekitar 2,1 juta dolar kepada Kamboja (Wiguna dkk, 2015:10). Tetapi Thailand menolak sehingga membuat hubungan diplomatik kedua negara semakin memburuk selama lebih dari tiga tahun. Sengketa kuil Preah Vihear antara Kamboja dan Thailand terjadi karena beberapa faktor salah satunya adalah perbedaan pendapat, persamaan kepentingan dan rasa iri. Faktor pertama yaitu karena perbedaan pendapat mengenai keadaan obyek kuil Preah Vihear. Kamboja beranggapan jika kuil tersebut dibangun oleh raja Kamboja maka kuil beserta wilayah sekitarnya merupakan kedaulatan Kamboja. Peta yang dibuat oleh Kolonial Perancis di Kamboja dengan Siam (Thailand) pada tahun 1907 juga merupakan bukti yang memperkuat pendapat Kamboja mengenai letak kuil Preah Vihear.

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa, sesuai dengan peta yang dibuat Siam dengan kolonial Perancis tahun 1904 selain itu berdasarkan tradisi ibadah masyarakat Thailand yang tinggal di dekat wilayah kuil, maka Thailand berasumsi bahwa letak kuil Preah Vihear berada di kedaulatannya. Perbedaan pendapat mengenai suatu objek inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa antara kedua negara. Kedua, faktor persamaan kepentingan, Kamboja dan Thailand adalah negara yang sama-sama mengandalkan pariwisata sebagai salah satu sumber penghasilan negara. Ada berbagai obyek wisata yang terkenal di kedua negara. Di Kamboja obyek yang terkenal adalah Ankor Wat, Koh Ker, Istana Kerajaan, Silver Pagoda dan lainnya. Sedangkan Thailand yaitu

Pattaya, Phuket, The Grand Palace, Wat Arun, Istana Raja, Wat Phra Kaew dan lainnya. Dikarenakan sudah dikenal sebagai negara dengan obyek wisata yang indah, oleh karena itu Thailand dan Kamboja saling berlomba untuk mendapatkan kedaulatan atas kuil Preah Vihear yang berusia lebih dari 900 tahun itu, karena dengan masuknya kuil tersebut ke kedaulatannya akan menambah pemasukan negara dari sektor pariwisata. Ketiga, yaitu adanya sikap iri Thailand terhadap Kamboja. Setelah penetapan sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2008, hal tersebut membawa keuntungan bagi Kamboja selaku negara yang memiliki obyek bersejarah tersebut.

Penetapan itu membuat Thailand merasa dirugikan karena penetapan tersebut dilakukan tanpa melibatkan Thailand, terlebih Thailand merasa berhak atas kuil Preah Vihear dan wilayah sekitarnya yang berukuran 4,6 km² (Chandara,2016:43). Penetapan kuil Preah Vihear oleh UNESCO menjadi warisan dunia pada tahun 2008 membuat Kamboja mengalami peningkatan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Thailand merasa dirugikan karena wisatawan mancanegara yang datang ke kuil Preah Vihear lebih banyak yang melewati wilayahnya dari pada Kamboja, karena akses menuju kuil lebih mudah dilewati melalui wilayah Thailand. Wilayah sekitar kuil yang berukuran 4.6 km² yang masih menjadi sengketa membuat Thailand merasa geram karena semua hasil pemasukan yang didapat dari kunjungan wisatawan ke kuil sepenuhnya dimiliki Kamboja padahal wilayah tersebut masih berupa sengketa yang belum terselesaikan. Berbagai faktor dan argumen antara Thailand dengan Kamboja menyebabkan konflik sengketa terjadi, meskipun telah ditetapkan ke dalam kedaulatan Kamboja oleh International Court of Justice tetapi Thailand masih belum bisa menerima putusan tersebut. Terlebih ICJ belum menetapkan kepemilikan wilayah sekitar kuil yang berukuran 4,6 km² tersebut sehingga masih menjadi

sengketa di antara kedua negara (Farida, 2014:58).

Sehingga konflik tidak dapat terhindar antar kedua negara. Upaya bilateral sudah dilakukan kedua pihak tetapi belum menemukan titik terang mengenai sengketa tersebut. Kamboja yang dulu pernah meminta pihak lain untuk menyelesaikan konflik, di konflik sengketa yang kedua, Kamboja juga meminta bantuan pihak luar (PBB) untuk menyelesaikan sengketa kedua negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam konflik ini menyarankan Kamboja dan Thailand untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), Dewan Keamanan PBB memberikan hak kepada ASEAN selaku perhimpunan negara Asia Tenggara untuk menyelesaikan konflik antara Thailand dengan Kamboja secara damai (Farida,2014:58). *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) adalah suatu organisasi regional di Asia Tenggara yang lahir karena adanya kesepakatan mengenai kerja sama untuk memajukan kesejahteraan sosial, ekonomi serta budaya dengan mengedepankan persahabatan dan non intervensi (Chandara,2016:47). ASEAN selaku organisasi regional telah memiliki instrumen konstitusi yang berupa penetapan Piagam ASEAN atau ASEAN Charter. Piagam ASEAN atau ASEAN Charter merupakan suatu dokumen konstitusional yang berisi mengenai norma, penegasan tentang wilayah kedaulatan, hak-hak serta kewajiban-kewajiban dan sejumlah kekuasaan dalam proses legislatif, eksekutif, dan yudisial (Farida, 2009:7). Prinsip yang terdapat pada ASEAN Charter antara lain adalah prinsip netralitas, prinsip menghormati kedaulatan negara anggota ASEAN, mengutamakan rencana yang tidak mengikat dan penyelesaian sengketa dengan cara damai. Prinsip netralitas mengenai tindakan ASEAN yang harus bersikap netral, adil, dan tidak memihak salah satu pihak di dalam konflik dan sebisa mungkin menghindari adanya konflik sesama anggota ASEAN. Prinsip

kedua adalah menghormati kedaulatan negara anggota, jika ada suatu konflik mengenai kedaulatan maka ASEAN menggunakan prinsip ini untuk mengambil keputusan melalui pelaksanaan konsensus, konsultasi dan persetujuan bersama (Farida, 2014:61). Ketiga adalah prinsip lebih mengutamakan konsensus dan rencana yang tidak mengikat dibandingkan peraturan hukum, ASEAN lebih memiliki kepercayaan sosial dari pada hukum untuk bernegosiasi dan konsultasi (Farida,2014:61). Prinsip keempat adalah penyelesaian sengketa secara damai karena ASEAN sangat menjunjung tinggi perdamaian dunia, sehingga segala permasalahan atau konflik diselesaikan dengan damai. Pada saat Dewan Keamanan PBB memberikan tugas pada ASEAN untuk membantu menyelesaikan konflik antara Thailand dan Kamboja, Indonesia merupakan ketua ASEAN pada saat itu (2011).

Upaya Indonesia membantu penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja diawali dengan kunjungan Marty Natalegawa selaku Menteri Luar Negeri Indonesia melakukan *Shuttle Diplomacy* atau diplomasi ulang alik. *Shuttle Diplomacy* adalah upaya dari pihak yang menegahi suatu pertikaian yang terjadi antara satu pihak dengan lainnya yang dilakukan dengan melakukan perjalanan ke wilayah satu pihak yang berkonflik dan dilanjutkan pergi ke wilayah pihak lainnya. Diplomasi ini pertama diperkenalkan oleh Henry Kissinger selaku mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat setelah terjadinya perang antara negara-negara arab dengan Israel yang dilakukan untuk meredam tensi konflik negara yang bersangkutan, sehubungan dengan berkembangnya teknologi maka diplomasi ini menjadi sering digunakan oleh pihak ketiga selaku penengah konflik (Aziz, 2019:47). Marty Natalegawa melakukan kunjungan ke Phnom Penh Kamboja dan menemui Menteri Luar Negeri Kamboja. Hor Nam Hong dan juga pergi ke Bangkok Thailand untuk menemui Menteri Luar

Negeri Kasit Piromya untuk mendapatkan informasi dari pihak pertama selaku pihak yang berkonflik (Nurfadhilah, 2017:7). *Shuttle Diplomacy* cukup efektif karena membuat kondisi kedua negara cukup stabil. Dalam perannya sebagai ketua ASEAN, Indonesia berupaya sebaik mungkin untuk membantu menyelesaikan konflik diantara Thailand dan Kamboja. Indonesia selaku pihak ketiga yang bertugas sebagai mediator dan fasilitator berusaha untuk bersikap inisiatif dan proaktif sehingga penyelesaian konflik sengketa kedua negara bisa berjalan dengan damai. Meskipun berperan sebagai pihak ketiga yang membantu penyelesaian masalah, namun Indonesia berperan sebagai mediator yang bertugas untuk mendengarkan pendapat pihak yang berkonflik serta fasilitator sebagai pihak yang mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik dan diberikan saran atau masukan mengenai penyelesaian konflik yang terjadi. Indonesia tidak selaku ketua ASEAN tidak pernah ikut campur secara langsung atau memihak salah satu dalam perundingan antar negara yang berkonflik (Nurfadhilah, 2017:8).

Saran atau rekomendasi dari ASEAN tidak selalu harus dilaksanakan, dan tidak bersifat mengikat. Jadi apabila ASEAN selaku pihak ketiga memberikan masukan atau rekomendasi upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik, boleh saja pihak yang terlibat tidak memaknai atau menuruti saran-saran tersebut karena ASEAN hanya pihak penengah yang tidak boleh mencampuri urusan kedua negara. Rekomendasi dan saran yang diajukan Indonesia selaku ketua ASEAN adalah mengupayakan genjatan senjata antara Thailand dengan Kamboja, menawarkan bantuan dari tim observasi ASEAN, dan mengubah perundingan *Joint Border Committee* (JBC) menjadi *GBC* atau *General Border Committee* (Nurfadhilah, 2017:8). Setelah upaya mediasi dan rundingan yang dilakukan, pada 18 Juli 2012 kedua negara menarik pasukan militernya yang berada di perbatasan dekat kuil Preah Vihear yang

disengketakan. Pemerintah Kamboja diperkirakan menarik 500 tentara militernya yang berada di perbatasan dan mengantinya dengan 250 polisi serta 100 petugas keamanan, Thailand juga dipastikan akan melakukan hal serupa (Farida,2014:65). Kemudian berangsur-angsur hubungan kedua negara menjadi lebih damai dan relatif stabil. Terpilihnya Yingluck Shinawatra sebagai Perdana Menteri Thailand juga membawa perubahan positif bagi hubungan bilateral kedua negara, karena Perdana Menteri Yingluck membuat kebijakan-kebijakan kerja sama antara Thailand diberbagai sektor sehingga perlahan membuat hubungan bilateral kedua negara dapat kembali baik. Pariwisata adalah salah satu sektor terbesar dalam penyumbang pendapatan suatu negara. Sektor pariwisata merangsang permintaan domestik serta ekonomi nasional yang berasal dari investasi pihak asing untuk memperluas infrastruktur dan hubungan sektor pariwisata dengan sektor ekonomi lainnya misalnya ritel, transportasi, grosir, jasa, manufaktur serta lainnya (Proenca dan Soukiaziz, 2008 dalam Rahmah,2018:1).

Bagi negara-negara di ASEAN, sektor pariwisata menjadi suatu yang menguntungkan karena dapat meningkatkan perekonomian negara dan mengurangi pengangguran serta meningkatkan kegiatan produksi, begitu juga dengan Thailand dan Kamboja. Thailand dan Kamboja adalah negara yang turut menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor utama pemasukan negara. Sebagai negara yang mengandalkan sektor pariwisata Thailand dan kamboja samasama memiliki fokus pada dua jenis sektor pariwisata yaitu pariwisata alam dan sejarah budaya (Musyaffa, 2017:100). Ada berbagai obyek wisata yang terkenal di kedua negara, di Kamboja obyek yang terkenal adalah Ankor Wat, Koh Ker, Istana Kerajaan, Silver Pagoda dan lainnya. Sedangkan Thailand yaitu Pattaya, Phuket, The Grand Palace, Wat Arun, Istana Raja, Wat Phra Kaew dan lainnya. Tetapi selama terjadi konflik

antara Thailand dan Kamboja, angka wisatawan yang datang turun semenjak tahun 2008-2011, bahkan jarang sekali wisata Thailand yang datang ke Kamboja dan juga sebaliknya. Setelah sengketa kuil Preah Pihear antara Thailand dengan Kamboja pada 2008-2011, kedua negara berupaya meningkatkan hubungan bilateralnya dengan kerja sama diberbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, dan pariwisata. Yingluck Shinawatra sebagai Perdana Menteri Thailand telah membuat berbagai kebijakan kerja sama diplomatik bagi kedua negara salah satunya adalah mengenai promosi sektor pariwisata, terlebih kedua negara memiliki fokus di jenis wisata yang sama yaitu alam dan sejarah budaya. Diawal awal tahun 2012 jumlah wisatawan dari Kamboja yang berkunjung ke Thailand juga sebaliknya mengalami peningkatan sebesar 90% dari tahun sebelumnya (Oktria,2013:12).

Kerja sama sektor pariwisata diawali Thailand dengan merencanakan single visa dengan Kamboja dengan mentandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama ini sebagai tanda ulang tahun ke-60 hubungan bilateral antara Thailand dan Kamboja (Fajryani,2016:7). Lalu Thailand dan Kamboja memperkenalkannya pada sub-region ASEAN yaitu ACMECS atau (Ayeyawaday-Chao PhrayaMekong Economic Cooperation Strategy) yang terdiri dari lima negara, Thailand, Kamboja Laos, Myanmar dan Vietnam (Fajryani,2016:6). Visa tunggal atau single visa merupakan visa yang dapat digunakan untuk wisatawan berkunjung ke berbagai negara dalam satu paket. Dengan single visa yang diberlakukan ACMECS maka wistawan yang hendak mengunjungi Thailand juga dapat mengunjungi Kamboja, Myanmar dan sebaliknya. Sebagai bentuk dukungan terhadap program single visa, Thailand menganggarkan dana 2.2 Triliun Bath yang digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur, seperti membangun proyek kereta api berkecepatan tinggi

yang menjadi penghubung antara Distrik Aranyaprathet di Provinsi Sa Kaeo di Thailand dengan Poipet di Kamboja (Oktria,2013:13). Penerapan visa tunggal di antara kedua negara memiliki urgensi yang cukup besar terhadap hubungan bilateral kedua negara. Walaupun pernah berkonflik dan bersitegang namun dengan adanya promosi pariwisata tersebut membuat hubungan Thailand dan Kamboja perlahan membaik, karena selain untuk memperbaiki hubungan diadakannya kerja sama di sektor pariwisata juga dapat menambah pemasukan kedua negara. Ada beberapa negara yang dapat menikmati fasilitas visa tunggal tersebut, sekitar 35 negara dapat berwisata ke Thailand dan Kamboja dalam sekali perjalanan. Wisatawan dari 35 negara yang telah ditentukan dapat berlibur ke Thailand dapat menetap selama 60 hari dan 60 hari juga di Kamboja (Fajryani, 2016:7).

Pada 21 April 2014 antara Kamboja dengan Thailand menandatangani suatu kerja sama pendidikan di sektor pariwisata bagi 3 negara, Thailand, Kamboja dan Indonesia yang bersepakat untuk mengembangkan program kerja sama pendidikan Diploma (D3) dalam sektor pariwisata dengan memanfaatkan teknologi dan pertukaran pelajar (Nurfadhilah,2017:10). Dengan adanya kerja sama pendidikan sektor pariwisata maka dapat meningkatkan hubungan antara Thailand dan Kamboja, ditambah dengan pertukaran pelajar antara pelajar Thailand dan Kamboja sehingga dapat bertukar wawasan dan pengalaman serta dapat menumbuhkan rasa kebersamaan di antara kedua negara. Semenjak kedua negara gencar-gencarnya melakukan kerja sama promosi pariwisata jumlah pengunjung di Thailand dan Kamboja meningkat setiap tahun, bahkan di tahun 2015 jumlah wisatawan Kamboja di Thailand meningkat 30% sedangkan jumlah wisatawan Thailand di Kamboja meningkat 37% (Nurfadhilah,2017:11). Data tersebut memperlihatkan bahwa kerja sama pariwisata diantara kedua negara mengakibatkan terjadi

peningkatan jumlah wisatawan yang datang sehingga dapat disimpulkan bahwa warga Thailand dan Kamboja sudah berdamai dan tidak memikirkan sengketa kuil Preah Vihear yang memakan korban jiwa tersebut. Dengan begitu maka hubungan antara dua negara tersebut menjadi lebih baik dan menjadi meningkat setelah terjadinya sengketa di antara keduanya. Sektor pariwisata di Thailand dan Kamboja yang menjadi pemasok pendapatan terbesar negara memiliki peran yang penting untuk meningkatkan hubungan antara Thailand dan Kamboja karena kedua negara tersebut memiliki misi yang sama yaitu menambah pendapatan negara, dikarenakan misi yang sama maka Thailand dan Kamboja berkerja sama untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan perlahan melalui kerja sama pariwisata tersebut dapat memperbaiki hubungan keduanya.

D.Kesimpulan

Konflik dan permasalahan merupakan suatu hal yang lumrah dalam hubungan internasional. Seperti konflik sengketa kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja tahun 2008-2011. Sengketa yang dulu pernah terjadi kembali terulang karena penetapan kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia oleh UNESCO yang membuat Thailand merasa dirugikan atas ketetapan tersebut. Konflik senjata yang dilakukan kedua negara menyebabkan banyak korban jiwa yang berjatuhan serta kerugian yang besar. Upaya perdamaian bilateral sudah dilakukan oleh kedua negara, tetapi tidak membuahkan hasil bagi sengketa tersebut. Sehingga Kamboja meminta bantuan pada Dewan Keamanan PBB untuk membantu kedua negara. Tetapi PBB menyarankan untuk membawa masalah sengketa tersebut ke ASEAN dengan cara damai. Indonesia yang pada saat itu menjabat sebagai ketua ASEAN berusaha untuk menemukan titik terang, mulai dari menjadi fasilitator dan mediator, namun tetap mengutamakan asas tidak ikut campur secara langsung mengenai penyelesaian

antara dua negara tersebut. Konflik perlahan dapat meredam, upaya memperbaiki hubungan ditingkatkan antara Thailand dan Kamboja. Berbagai bentuk kerja sama diupayakan, salah satunya adalah pada sektor pariwisata. Thailand dan Kamboja adalah negara yang turut menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor utama pemasukan negara. Berbagai kerja sama pariwisata dibentuk untuk meningkatkan hubungan kedua negara seperti penerapan single visa, pertukaran bagi pelajar yang menempuh pendidikan D3 pariwisata, memperbaiki dan membangun infrastruktur untuk menunjang penerapan single visa dan lainnya. Walaupun sebelumnya pernah berkonflik dan bersitegang namun dengan adanya promosi pariwisata dan kerja sama pariwisata dapat membuat hubungan Thailand dan Kamboja perlahan membaik. Sehingga dengan kerja sama pariwisata memiliki peran penting untuk meningkatkan hubungan kedua negara tersebut.

Daftar Referensi

- Artega, dkk. 2019. *Konflik antar Negara Berdasarkan Hukum Internasional*. Jurnal Ilmu Hukum: Kanun, 21(1), 159-172.
- Aziz, M. N. 2019. *Shuttle Diplomacy Indonesia di ASEAN Terkait Konflik Laut Tiongkok Selatan*. Frequency of International Relations: FETRIAN, 1(1), 37-78.
- Chandara, M. 2016. *Upaya dan Hambatan Indonesia sebagai Ketua ASEAN Meredakan Ketegangan antara Kamboja dengan Thailand dalam Konflik Perebutan Kuil Preah Vihear*. Skripsi tidak diterbitkan. Jember: FISIP Universitas Jember.
- Fajryani, D. P. 2016. *Kebijakan Pemerintah Thailand Berpartisipasi di ASEAN Tourism Forum (ATF) dalam Meningkatkan Industri Pariwisata Tahun 2011-2015*. Jurnal Online Mahasiswa, 3(1), 1-10.
- Farida, E. 2014. *Penyelesaian Sengketa Perbatasan antara Thailand dan Kamboja Melalui Mekanisme ASEAN*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 43(1), 57-66.
- Farida, E. 2009. *Efektivitas Piagam ASEAN (ASEAN Charter) Bagi ASEAN sebagai Organisasi Internasional*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum: QISTIE, 3(3), 1-14.
- Musyaffa, F. H. 2017. *Kontribusi Asian Development Bank terhadap Peningkatan Sektor Pariwisata Kamboja Tahun 1993-2015*. Skripsi tidak diterbitkan. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan.
- Mangku, D. G. S. 2011. *Peluang dan Tantangan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear di Perbatasan Kamboja dan Thailand*. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum: Pandecta, 6(2), 106-116.
- Mangku, D. G. S. 2012. *Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN*. Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan: Perspektif, 17(3), 150-161.
- Nurfadhilah, T. 2017. *Hubungan Bilateral Thailand dan Kamboja Pasca Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear*, (Online), (https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/741/jbptunikompp-gdl-tianurfadh-37031-1-unokom_4-1.pdf), diakses pada 17 Oktober.
- Oktria, O. A. 2013. *Kebijakan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra terhadap Sengketa Kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja*. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, 2(2), 241-262.
- Raharjo, S.N. I. 2013. *Tantangan Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja bagi Stabilitas ASEAN*. Jurnal Kajian Wilayah, 4(1), 106-121.
- Rahmah. 2018. *Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN Tahun 2004-2016*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Wiguna, dkk. 2015. *Implikasi Gerakan People's Alliance for Democracy (PAD) Terhadap Kebijakan Luar Negeri Thailand Terkait Hubungan Bilateral Thailand-Kamboja Tahun 2008-2011*. Jurnal Hubungan Internasional, 1(3), 1-14.
- Widia, T. 2018. *Analisis Kebijakan Thailand dalam Sengketa Perbatasan dengan Kamboja Studi Kasus: Konflik Wilayah sekitar Kuil Preah Vihear 2008*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.